

## Dampak Covid-19 pada Anggaran Kegiatan Pelatihan IKM Kerajinan dan Aneka di Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram

Nurul Al Firah<sup>a</sup>, Animah<sup>b</sup>, Nurabiah<sup>c</sup>  
Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram  
Jl. Majapahit No.62, Mataram, Indonesia<sup>a,b,c</sup>  
nurulalfirah0505@gmail.com

### ABSTRAK

Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi dimasa pandemi *Covid-19* dengan mengambil kebijakan *refocusing* anggaran. Pemerintah daerah juga melakukan *refocusing* anggaran pada setiap instansi. Salah satunya yaitu, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak *Covid-19* pada anggaran kegiatan pelatihan IKM kerajinan dan aneka pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perubahan anggaran terjadi karena adanya *refocusing* anggaran. Anggaran yang dipotong difokuskan pada penanganan *Covid-19*. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan implikasi yang luas mengenai *stewardship theory*. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi sebagai bahan masukan atau saran bagi pihak Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram terkait anggaran kegiatan pelatihan dimasa pandemi *Covid-19*. Secara kebijakan, penelitian ini dapat memberikan implikasi sebagai bahan masukan ataupun pertimbangan bagi pemerintah daerah terkait kebijakan daerah khususnya *refocusing* dalam mengatasi dampak negatif yang muncul akibat *Covid-19*. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, hanya melihat dari aspek *refocusing* anggaran dan adanya keterbatasan jangkauan peneliti untuk mengumpulkan dokumentasi dalam validasi data keuangan yang didapatkan, karena kondisi pandemi *Covid-19* dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

**Kata Kunci:** *Covid-19*; Pelatihan IKM kerajinan dan aneka (INKRA); *Refocusing*.

*The Impact of Covid-19 on The Budget of IKM Craft and Miscellaneous Training Activities in The Ministry of Industry, Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Mataram City*

### ABSTRACT

The government is doing various ways to overcome economic problems during the *Covid-19* pandemic by taking a budget *refocusing* policy. Local governments also refocus budgets at each agency. One of them is, the Department of Industry, Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Mataram City. This research aims to analyze the impact of *Covid-19* on the budget of small and medium-sized industries training activities for handicrafts and various fields at the Mataram City Industrial, Cooperative and Small and Medium Enterprises Office. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews and documentation. The results of this study can be concluded that budget changes occur due to budget *refocusing*. The budget cut is focused on handling *Covid-19*. Theoretically, this study could have far-reaching implications regarding *stewardship theory*. Practically speaking, this study has implications as input or advice for the Department of Industry, Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Mataram City related to the budget of training activities during the *Covid-19* pandemic. Policy-wise, this research can provide implications as input or consideration for local governments related to local policies, especially *refocusing* in overcoming the negative impacts arising from *Covid-19*. The involvement in this study is, namely, only looking at the aspect of budget *refocusing* and the limited range of researchers to collect documentation in the validation of financial data obtained, due to the conditions of the *Covid-19* pandemic and the Implementation of Community Restrictions (PPKM).

**Keywords:** *Covid-19*; *Refocusing*; Small and Medium Industry Training of crafts and miscellaneous (INKRA).

---

**PENDAHULUAN**

Penyakit *Corona virus (Covid-19)* yang berawal di Kota Wuhan-Cina, pada bulan Desember 2019 telah menyebar ke seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang meminta Kementerian / Lembaga (K/L) untuk mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan *Covid-19* sesuai protokol penanganan. Pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan *refocusing* anggaran. Dengan adanya program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah, maka pemerintah kota Mataram pada tahun 2020 juga telah melakukan perubahan pada anggaran dinas awal yang sebelumnya telah dianggarkan. Perubahan tersebut dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*.

Anggaran kegiatan pelatihan industri kecil menengah bidang perindustrian dari tahun 2018 hingga 2020 anggaran kegiatan pelatihan yaitu fokus pelatihan jahit mengalami kenaikan yang signifikan. Sedangkan, untuk pelatihan anyaman hanya terdapat pada tahun 2018 dan 2019. Sehingga, fokus pelatihan IKM kerajinan dan aneka pada tahun 2020 hanya pada pelatihan jahit. Dimana, pada tahun 2020 terjadinya *Covid-19* yang menyebabkan anggaran kegiatan pelatihan IKM kerajinan dan aneka harus melakukan *refocusing*. Anggaran awal dari kegiatan pelatihan IKM kerajinan dan aneka sebesar 30.825.000 namun, setelah adanya *refocusing* anggaran dipotong hingga akhirnya menjadi 17.575.000. Sedangkan pada tahun 2021 anggaran kegiatan pelatihan IKM kerajinan dan aneka Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM ditiadakan. Hal ini tentu saja dilakukan pemerintah daerah untuk penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi.

Pemerintah Kota Mataram juga mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan/atau penanganan *Covid-19* dalam APBD Perubahan Kota Mataram. Sesuai dengan Press Release yang dikeluarkan Walikota Mataram tentang penanganan *Covid-19* Kota Mataram bahwa penanganan kesehatan *Covid-19* menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Mataram, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram, strategi pertama dimulai dari isolasi dan pengobatan pasien positif *Covid-19*. Strategi kedua, melaksanakan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dengan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak *Covid-19*. Penerima JPS yang ditangani Pemerintah Kota Mataram sebanyak 26.000 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari perempuan sosial ekonomi, anak terlantar, disabilitas, veteran perang, marbot masjid, anak yatim, serta masyarakat terdampak *Covid-19* lainnya seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pegawai dirumahkan, dan dampak lainnya. Bantuan yang diberikan JPS Kota Mataram sebesar Rp250.000,00- yang diberikan dalam bentuk paket sembako yang terdiri dari: 10 kg beras, 10 butir telur, 1 lt minyak goreng, 1 kg produk olahan ikan, 4 bungkus biskuit, 1 kg gula pasir, dan sabun.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri 2020 Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Hal ini membuat salah satu bidang di Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram harus melakukan *refocusing* anggaran, bidang tersebut adalah bidang perindustrian. Anggaran yang di *refocusing* adalah anggaran pelatihan industri kecil menengah baik itu kegiatan pelatihan industri kerajinan, industri pangan serta industri logam, mesin dan elektronik.

Terkait dengan hal tersebut di atas, ini didukung dengan penelitian terkait anggaran di masa pandemi *Covid-19* yang dilakukan oleh (Onibala et al., 2021) yang membahas tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Minahasa Tenggara yang turut terdampak pandemi virus Corona *Covid-19*. Dimana, APBD Kabupaten Minahasa Tenggara terjadi pengurangan terkait dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), transfer daerah maupun dana bagi hasil serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ikut berkurang. Anggaran yang ada dalam APBD juga dialihkan untuk penanganan virus *Covid-19*. Sehingga pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara melaksanakan *refocusing* anggaran untuk menanggulangi penyebaran *Covid-19*. Adapun

penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Silaban, 2021) dengan hasil penelitian penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 di Kabupaten Bulungan telah berjalan dengan efektif namun hasilnya kurang maksimal. Hal ini dikarenakan adanya pandemi yang melanda sepanjang tahun ini, sehingga pemerintah daerah diminta agar cepat *refocusing* anggaran pada tahun ini untuk dipergunakan dalam upaya pencegahan dan penanganan virus corona.

Penelitian yang dilakukan (Sanjaya, 2020), Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran yang diamanatkan oleh pemerintah pusat untuk fokus kepada bidang penanganan kesehatan, pemulihan sektor ekonomi, dan jaringan pengaman sosial. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Dachi, 2021) *refocusing* anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah apabila dicermati lebih banyak dibebankan pada rencana-rencana pengeluaran daerah yakni belanja-belanja yang ditetapkan pada pagu anggaran pada tahun terkait yakni tahun anggaran 2020. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Grediani, 2020), mendapatkan hasil bahwa pandemi virus *Covid-19* memberikan dampak terhadap aktivitas kegiatan kemasyarakatan dan anggaran pemerintah daerah. Berdasarkan pada tinjauan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak *Covid-19* pada anggaran kegiatan pelatihan IKM kerajinan dan aneka Dinas Perindustrian, Kota dan UKM Kota Mataram.

Penelitian ini diperkuat oleh *stewardship theory*. Dimana, *stewardship theory* menjelaskan situasi dimana para *steward* (Pemerintah) lebih mementingkan kepentingan *principal* (Masyarakat) daripada kepentingan pribadi ((Donalson dan Davis (1991) dalam (Ikhsan & Suprasto, 2008)). Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya manusia dapat berperilaku dan bertindak dengan penuh rasa tanggung jawab, memiliki integritas yang tinggi, dapat dipercaya, dan memiliki sifat jujur. Adapun implikasi *stewardship theory* pada penelitian ini yaitu untuk menggambarkan dan mendeksripsikan peran pemerintah Kota Mataram yang mampu memberikan komitmen dengan cara melakukan *refocusing*. Adanya covid 19 mempengaruhi semua anggaran yang ada di pemerintah, sehingga pemerintah melakukan kebijakan yaitu dengan melakukan *refocusing* anggaran. Oleh karena itu pemerintah kota mataram melakukan perannya sebagai pengelola dengan ikut melakukan *refocusing* anggaran.

Dampak dari pemerintah Kota Mataram melakukan *refocusing* anggaran bagi masyarakat adalah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya, mampu menampung aspirasi dari masyarakat, dapat dipercaya, dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepadanya serta mampu mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakan yang diambil.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Stewardship Theory*

Teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah *stewardship theory*. Dimana, *stewardship theory* menjelaskan situasi dimana para *steward* (Pemerintah) lebih mementingkan kepentingan *principal* (Masyarakat) daripada kepentingan pribadi ((Donalson dan Davis (1991) dalam (Ikhsan & Suprasto, 2008)). Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya manusia dapat berperilaku dan bertindak dengan penuh rasa tanggung jawab, memiliki integritas yang tinggi, dapat dipercaya, dan memiliki sifat jujur. Teori *Stewardship* ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *Stewardship* adalah Pengelola meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Pengelola akan berpeprinsrilaku sesuai kesepakatan dan kepentingan bersama. Ketika terjadi benturan antara kepentingan dua pihak tersebut, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama menjadi lebih utama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu.

Donaldson dan Davis (1991) menggambarkan bahwa teori *stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana para *steward* (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan *principal* (pemilik). Kondisi ini didasari sikap melayani yang demikian besar dibangun oleh

*steward*. Sikap melayani sebagai suatu sikap yang menggantikan kepentingan pribadi dengan pelayanan sebagai landasan bagi pemilikan dan penggunaan kekuasaan (*power*). Dengan mengintegrasikan kembali pengurusan pekerjaan, pemberdayaan, kemitraan dan penggunaan kekuasaan dengan benar, maka tujuan individu secara otomatis terpenuhi dengan sendirinya. *Steward* (pengelola) percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan perusahaan dan pemilik (*principal*).

Adapun implikasi *stewardship theory* pada penelitian ini yaitu untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peran pemerintah Kota Mataram yang mampu memberikan komitmen dengan cara melakukan *refocusing*. Adanya *Covid-19* mempengaruhi semua anggaran yang ada di pemerintah, sehingga pemerintah melakukan kebijakan yaitu dengan melakukan *refocusing* anggaran. Oleh karena itu pemerintah kota mataram melakukan perannya sebagai pengelola dengan ikut melakukan *refocusing* anggaran.

Dampak dari pemerintah Kota Mataram melakukan *refocusing* anggaran bagi masyarakat adalah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya, mampu menampung aspirasi dari masyarakat, dapat dipercaya, dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepadanya serta mampu mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakan yang diambil.

### **PENGARUH COVID-19 PADA REFOCUSING ANGGARAN**

*Refocusing* merupakan suatu alternatif dalam meminimalisir terjadinya resesi ekonomi guna menjamin stabilitas ekonomi nasional (Sopannah & Haikal, 2021). *Refocusing* dapat digunakan oleh suatu negara untuk menjamin stabilitas keuangan akibat hentakan ekonomi global dan membuat sistem ekonomi menjadi menurun dikarenakan terjadi keadaan yang tidak tepat atau sedang mengalami krisis (Junaidi et al., 2020).

Dalam aspek kebijakan anggaran, aturan khusus yang mengatur tentang *refocusing* yang diatur pemerintah melalui instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Pemerintah pusat menginstruksikan pemerintah daerah dan satuan kerja pemerintahan melakukan realokasi anggaran dan penyesuaian (*refocusing*) program pemerintah. Pandemi *Covid-19* juga mengubah Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah (RKPD). Penyesuaian program yang di instruksikan pemerintah memiliki tiga fokus, yakni kesehatan; jaring pengaman sosial; dan penanggulangan dampak ekonomi. Pemerintah melakukan realokasi dana untuk memastikan kemampuan fiskal nasional dan daerah ketika membiayai tiga fokus tersebut. Perubahan fokus program ini menggeser paradigma implementasi pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Implementasi tiga fokus utama tersebut diharapkan mampu berjalan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan sidang Kabinet Paripurna yang dilakukan melalui *Video Convergence*, Jokowi (2020) menyebutkan bahwa tujuan dari *Refocusing* Anggaran yaitu pemangkasan belanja-belanja yang tidak prioritas, pemotongan rencana belanja yang tidak mendesak: perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat, lalu fokuskan semua kekuatan kita pada upaya penanganan *Covid-19*, baik itu dibidang kesehatan maupun penanganan dampak sosial ekonominya.

### **PELATIHAN IKM KERAJINAN DAN ANEKA**

Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bahwa mengembangkan produk IKM merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap IKM dalam mendesain, mengembangkan dan meluncurkan sebuah produk yang berdaya saing di pasar dalam dan luar negeri melalui fasilitasi-fasilitasi baik terhadap SDM IKM nya maupun pada produk yang dihasilkan. Fasilitasi yang diberikan di antaranya: Bimbingan Penerapan dan Sertifikasi GMP/HACCP/SNI/MD; Fasilitasi Sertifikasi SNI dan SNI Wajib (mainan anak, pakaian bayi, logam, garam, dsb); Fasilitasi Sertifikasi Halal dan Atribut Pangan; Fasilitasi Pendaftaran Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Paten, dan Indikasi Geografis; Fasilitasi Bantuan Desain Kemasan dan Merek; Pelatihan dan Fasilitasi Sarana Produksi; Dampingan Tenaga Ahli Desain dan Teknik Produksi.

Sentra merupakan suatu wilayah/kawasan tertentu, tempat sekelompok perusahaan IKM yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis atau melakukan proses pengerjaannya sama

yang dapat diperkuat melalui pengembangan kemampuan SDM, pengembangan teknologi, perluasan informasi dan pengembangan pasar sentra. Fasilitas yang diberikan di antaranya: Pelatihan peningkatan pengetahuan SDM, Fasilitas mesin/peralatan produksi, Bimbingan teknis produk sentra, Magang ke sentra industri maupun ke industri besar, Fasilitas kelembagaan sentra, Pembinaan sentra oleh TPL IKM (masing-masing TPL membina 6 sentra).

Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha – wirausaha IKM baru dalam mengisi ketidakseimbangan antara Jawa dan Luar Jawa serta memperkuat kemampuan wirausaha IKM agar menjadi wirausaha yang mandiri dan profesional. Bentuk program pengembangan wirausaha baru IKM: Pelatihan kewirausahaan kepada TPL, mahasiswa/alumni perguruan tinggi, masyarakat umum; Pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi dibidang komoditi pangan, sandang, kimia bahan bangunan, logam dan elektronika melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB); Magang ke sentra industri maupun ke industri besar; Pendampingan tenaga ahli; Pemberian bantuan mesin/peralatan sederhana sebagai langkah awal memulai usaha; Fasilitas pameran.

## METODE PENELITIAN

Kriteria yang digunakan penelitian kualitatif adalah bahwa hasil penelitian yang dilakukan harus memenuhi empat kriteria, yaitu *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) (Siyoto & Sodik, 2015). Keabsahan data disebut juga validitas data, artinya bertujuan membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus bertujuan untuk menguji keakuratan data yang diperoleh. Penelitian ini sendiri menguji dengan cara melakukan triangulasi antara hasil wawancara dengan dokumen yang didapatkan berdasarkan indikator yang ada.

Peneliti melakukan kunjungan pendahuluan ke objek penelitian dengan tujuan untuk melakukan pendekatan kepada para staf perindustrian dan melakukan observasi awal. Tujuan survei adalah untuk menjelaskan manfaat dan tujuan dari penelitian yang dilakukan kepada staf bidang perindustrian serta mengetahui keadaan umum dinas dalam memperoleh gambaran atas penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram, khususnya bidang perindustrian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sendiri dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara akan dilakukan langsung dengan Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram, Kepala Bidang Perindustrian, Kepala Seksi Bidang Perindustrian, serta Staf Bidang Perindustrian. Pemilihan narasumber ini dikarenakan mereka adalah orang-orang yang terlibat langsung mulai dari pembuatan Rencana Kegiatan Anggaran sampai dengan kegiatan pelatihan IKM kerajinan. Adapun, aspek yang dilihat dalam melakukan wawancara dan dokumentasi adalah *refocusing* anggaran serta penanganan *Covid-19*.

Terdapat empat komponen desain penelitian yang sangat penting dalam metode studi kasus (Yin, 2006), yaitu pertanyaan penelitian, proporsi, unit-unit analisis dan kriteria untuk menginterpretasikan temuan. Pertanyaan penelitian, diajukan dalam pemenuhan suatu klarifikasi atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah pertanyaan penelitian yang diajukan: “Bagaimana *Covid-19* terhadap anggaran kegiatan pelatihan IKM kerajinan dan aneka di Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram?”. Proporsi, penelitian ini tanpa ada proporsi dikarenakan studi kasus yang digunakan bersifat eksploratori, dimana yang akan dianalisis adalah temuan sebagai bahan penelitian. Unit-unit analisis adalah berkaitan dengan penentuan kasus dalam penelitian yang bersangkutan. Unit analisis yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu berupa: *Covid-19* pada anggaran kegiatan pelatihan IKM kerajinan dan aneka dan *Refocusing* Anggaran. Kriteria untuk menginterpretasikan temuan, merupakan hasil analisis dari kegiatan yang sedang berjalan akan dapat ditarik menjadi suatu simpulan, sehingga diharapkan dapat menganalisa kelemahan dan kelebihan yang terjadi dalam *Covid-19* terhadap anggaran kegiatan pelatihan IKM kerajinan dan aneka di Kota Mataram.

---

**HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Hampir seluruh negara termasuk Indonesia saat ini sedang terdampak akibat pandemi *Covid-19*, dimana dampaknya mempengaruhi aspek kesehatan dan ekonomi. Sementara di Indonesia *Covid-19* telah menyebar termasuk Kota Mataram. Adapun dampak yang disebabkan *Covid-19* pada aspek kesehatan adalah naiknya kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*. Sedangkan dalam aspek ekonomi yaitu, angka pengangguran naik, serta penurunan omset yang dirasakan oleh pelaku usaha karena daya beli masyarakat menurun. Oleh sebab itu peneliti memaparkan analisis data yang diperoleh dari pernyataan informan yang akan dilakukan reduksi data seperti pada tabel 1 yang ada di lampiran.

*Refocusing* merupakan suatu alternatif dalam meminimalisir terjadinya resesi ekonomi guna menjamin stabilitas ekonomi nasional. *Refocusing* dapat digunakan oleh suatu negara untuk menjamin stabilitas keuangan akibat hentakan ekonomi global dan membuat sistem ekonomi menjadi menurun dikarenakan terjadi keadaan yang tidak tepat atau sedang mengalami krisis. Sejalan dengan pendapat Pak Dedy, mengatakan:

*“Adanya pandemi Covid-19 saat ini, membuat pemerintah mengambil kebijakan yaitu seperti yang kita tau yaitu melakukan refocusing anggaran, sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan.”*

Sejalan dengan pendapat narasumber Bu hana mengungkapkan bahwa peraturan serta kebijakan dari pusat diberlakukan untuk seluruh Indonesia, sehingga pemerintah daerah mengeluarkan surat agar segera melakukan *refocusing* anggaran, menyatakan:

*“Walikota Mataram mengeluarkan surat melalui Setda Kota Mataram Kemudian disebarkan oleh BKD Kota Mataram ke instansi-instansi kota Mataram agar melakukan refocusing anggaran sebesar 50% untuk menangani Covid-19.”*

Berbeda dengan narasumber Pak Khairul, karena narasumber Pak Khairul belum terlalu paham mengenai anggaran tahun 2020 yang disebabkan beliau baru dilantik sebagai kepala bidang Industri bulan Oktober 2021. Jadi beliau hanya melanjutkan kegiatan yang sudah direncanakan oleh Kepala Bidang sebelumnya Meskipun demikian beliau mengungkapkan hal yang sejalan dengan Pak Dedy serta narasumber Bu Hana yang menyatakan:

*“Anggaran dilakukan sesuai dengan adanya peraturan serta kebijakan dari pemerintah pusat yang disampaikan melalui pemerintah daerah untuk melakukan refocusing anggaran guna menangani Covid-19.”*

Narasumber Bu Yuliati juga memiliki pendapat yang sejalan dengan Bu Hana yang menyatakan:

*“Refocusing anggaran ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menangani Covid-19. Jadi BKD mengeluarkan kebijakan untuk memotong anggaran sebesar 50% yang digunakan untuk melakukan penanganan Covid-19.”*

Narasumber Bu Titin ini lebih memperkuat hasil wawancara dengan narasumber Pak Dedi yang mana menyatakan:

*“Bahwasannya untuk refocusing anggaran ini sudah diatur oleh peraturan pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah serta Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing anggaran dan diterapkan diseluruh Indonesia.”*

---

Untuk menyikapi adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 para instansi harus mengikuti kebijakan yang sudah ada dengan peraturan yang mendukung, sesuai dengan yang dikatakan oleh narasumber Bu Hana, menyatakan:

*"Kami bidang industri menyikapi adanya refocusing anggaran ini harus sesuai dengan kebijakan serta peraturan yang sudah dikeluarkan. Jika diminta untuk memotong anggaran 50% kami akan melakukan pemotongan anggaran dengan cara merevisi anggaran yang sudah dianggarkan sebelumnya. Kami melakukan pemotongan anggaran dengan memotong anggaran kegiatan pelatihan IKM kerajinan dan aneka. Di sini kami mengurangi jumlah peserta pelatihan IKM kerajinan dan aneka. Dimana, sebelumnya kami anggar untuk tahun 2020 jumlah peserta pelatihan sebanyak 20 orang setelah adanya refocusing anggaran kami mengurangi sebesar 50%, jadi yang kita anggar hanya untuk 10 orang peserta pelatihan IKM kerajinan dan aneka di tahun 2020."*

Narasumber Pak Khairul memberikan informasi tambahan untuk tahun 2021 yang menyatakan bahwa tidak ada lagi kegiatan pelatihan IKM kerajinan dan aneka untuk tahun 2021:

*"Untuk tahun 2021 tidak lagi menggunakan persenan namun dalam bentuk angka."*

Narasumber Pak Dedy memberikan informasi tambahan bahwasannya:

*"Kita melakukan refocusing anggaran sesuai kebijakan yang diatas kita, bidang yang melakukan refocusing tahun 2021 hanya pada bidang industri saja."*

Narasumber Bu Yulianti memberikan informasi mengenai anggaran tahun 2020 dan tahun 2021:

*"Ada perbedaan pemotongan anggaran untuk tahun 2020 dan 2021 bahwa pada tahun 2020 pemotongan melalui persenan sedangkan pada tahun 2021 dalam bentuk persenan, dan juga untuk tahun 2021 hanya bidang perindustrian saja yang melakukan refocusing."*

Dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di tengah masyarakat membuat pemerintah harus mengeluarkan peraturan dan kebijakan untuk melakukan penanganan Covid-19. Dengan adanya Covid-19 dan harus melakukan *refocusing* anggaran Maka hal ini ini sangat berdampak bagi instansi-instansi yang ada di pemerintahan Kota Mataram. salah satunya adalah instansi Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram. sejalan dengan yang dikatakan oleh narasumber Bu Hana, menyatakan:

*"Dengan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 memiliki dampak yang lumayan besar dan rumit karena kami dibidang industri harus merevisi kembali anggarannya sudah kami agar kan untuk tahun 2020. kami berdiskusi anggaran mana saja yang harus dipotong guna memenuhi kebijakan pemerintah kota Mataram untuk memotong anggaran sebesar 50%."*

Narasumber Pak Khairul memberikan argumen tambahan untuk tahun 2021, menyatakan:

*"Bahwasannya pemotongan anggaran untuk tahun 2021 berbeda dengan tahun 2020. Dimana, untuk tahun 2020 pemotongan berupa persenan sedangkan pemotongan anggaran untuk tahun 2021 tidak berupa persenan melainkan setda kota Mataram sudah mempatokkan seberapa besar atau berupa angka untuk melakukan pemotongan anggaran di tahun 2021."*

Adapun alasan yang diberikan tentang pemotongan anggaran pada anggaran kegiatan pelatihan IKM kerajinan dan aneka yaitu, berdasarkan pemaparan informasi dan narasumber bahwa jika anggaran yang lain dipotong seperti pameran, anggaran untuk pameran tidak mungkin dipotong karena di anggaran tersebut terdapat tiket pesawat, hotel dan lain sebagainya sehingga anggaran yang bisa dipotong hanya anggaran pelatihan saja dengan melakukan pengurangan terhadap jumlah peserta yang mengikuti pelatihan IKM.

*Refocusing* yang dilakukan pemerintah difokuskan untuk penanganan *Covid-19*. Penangan *Covid 19* membantu para masyarakat yang terdampak *Covid-19*. Adapun, bentuk dari Penanganan *Covid-19* adalah isolasi dan pengobatan pasien *Covid-19*, serta bantuan Jaminan Pengaman Sosial berupa paket sembako yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak *Covid-19*.

Oleh sebab itu peneliti memaparkan analisis data yang diperoleh dari pernyataan informan yang akan dilakukan reduksi data pada tabel 2 seperti pada lampiran.

Pandemi *Covid-19* telah menimbulkan dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Sehingga dengan adanya pandemi *Covid-19* yang telah masuk di Indonesia membuat pemerintah harus memutar otak untuk melakukan penanganan seperti yang dikatakan oleh narasumber Pak Dedy:

*“Melakukan refocusing anggaran sesuai dengan kebijakan untuk melakukan penanganan Covid-19.”*

Kemudian Narasumber Bu Yuliati memberikan pendapat lebih, mengatakan:

*“Mengikuti instruksi dari atasan untuk melakukan refocusing anggaran kemudian kami salurkan ke Satgas Covid-19.”*

Narasumber Pak Khairul memberikan informasi yang lebih rinci dari narasumber sebelumnya, yang menyatakan:

*“Bahwasannya, dengan adanya pandemi Covid-19 ini presiden langsung mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 Tentang Refocusing kegiatan, Realokasi anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Dimana, peraturan ini dikeluarkan untuk menangani Covid 19 yang terjadi di tengah masyarakat.”*

Narasumber Bu Hana melengkapi argumen dari Pak Khairul untuk kota Mataram mengenai anggaran yang telah di *refocusing* dan disalurkan pada Satgas *Covid-19*. Dimana, Satgas *Covid-19* yang memposkan anggaran yang sudah dipotong dari setiap dinas. Narasumber Bu Hana, mengatakan:

*“Kami melaksanakan Refocusing anggaran yang kemudian anggaran yang sudah kami potong tersebut kita salurkan ke Satgas Covid-19, yang nantinya Satgas Covid-19 yang akan memposkan dana tersebut. Misalnya, Puskesmas dialihkan ke Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dialihkan ke Rumah Sakit, untuk semprot semprot disinfektan dan lain sebagainya dialihkan ke BPBD sudah ada pos-pos nya sendiri. kami tidak tahu jumlahnya berapa yang tahu masalah tersebut adalah Pak Sekda, tugas kita mengumpulkan anggaran di dinas ini Dan nanti anggaran yang sudah kami kumpulkan akan diposkan oleh Satgas Covid-19 dan kemana saja anggaran tersebut akan dialihkan.”*

Mengenai penanganan *Covid-19* pemerintah kota Mataram mengeluarkan *press release* tentang penanganan *Covid-19* kota Mataram. Narasumber Bu Titin memiliki pendapat yang sejalan, mengatakan:

*“Pemerintah kota Mataram telah mengeluarkan kebijakan untuk menangani Covid-19, yang dimana bentuk penanganan Covid-19 tersebut berupa paket bantuan serta pengobatan dan isolasi pasien Covid-19.”*

Bentuk pembiayaan dan penyaluran dana untuk penanganan pandemi *Covid-19*. Dimana, pembiayaan dan penyaluran dana ini di lakukan oleh Satgas *Covid-19* sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Dedy yang menyatakan:

*“Untuk itu bukan ranah kami, Satgas Covid-19 yang melakukannya.”*

Pendapat dari Pak Dedy merupakan suatu perwakilan untuk narasumber yang lain, karena narasumber yang lain juga memberikan informasi bahwa bukan merupakan ranah maupun tugas dari Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram yang melakukan penyaluran dana tersebut melainkan Satgas *Covid-19*. Satgas *Covid-19* yang menyalurkan dana tersebut sesuai dengan pos-pos yang telah diatur. Misalnya, Puskesmas dialihkan ke Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dialihkan ke Rumah Sakit, untuk semprot semprot disinfektan dan lain sebagainya dialihkan ke BPBD sudah ada pos-pos nya sendiri. Satgas *Covid-19* yang mengatur kemana saja anggaran tersebut akan dialihkan.

Alasan adanya *refocusing* anggaran untuk penangan *Covid-19*, untuk memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan dan yang terdampak *Covid-19*, sesuai yang dikatakan oleh Bu Hana yaitu:

*“Untuk biaya isolasi dan pengobatan yang terdampak Covid-19, memberikan paket sembako kepada yang membutuhkan serta yang terdampak Covid-19.”*

Narasumber Pak Khairul memiliki pendapat yang sama dengan Bu Hana, yang menyatakan:  
*“Untuk diberikan kepada pihak yang memerlukan terutama yang terkena Covid-19 seperti biaya pengobatan.”*

Untuk melakukan penangan *Covid-19* harus disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan yang ada, seperti yang dikatakan oleh Pak dedy yaitu:

*“Mengikuti sesuai kebijakan pemerintah.”*

Sejalan dengan Pak Dedy, Bu Yuliati juga memiliki pendapat yang sama yang menyatakan:

*“Mengikuti kebijakan dan aturan untuk menangani Covid-19.”*

### ***Refocusing Anggaran Kegiatan Pelatihan IKM Kerajinan dan Aneka Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram Tahun 2020***

Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram melakukan *refocusing* anggaran sesuai dengan kebijakan serta peraturan yang telah dikeluarkan. Dimana, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram melakukan *refocusing* anggaran pada semua bidang yang berada di dinas tersebut. Bidang-bidang yang di *refocusing* antara lain adalah bidang perindustrian, koperasi dan UKM. Pada bidang industri, anggaran yang di *refocusing* adalah anggaran kegiatan pelatihan IKM kerajinan dan aneka; pangan; serta logam, mesin dan elektronik. Anggaran kegiatan pelatihan IKM kerajinan dan aneka dipotong sebesar 50% sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Walikota melalui Setda Kota Mataram dan disebar oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram.

Dampak dari adanya *refocusing* anggaran ini sangat besar, karena dengan adanya *refocusing* anggaran, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram harus melakukan pemotongan anggaran sesegera mungkin untuk disalurkan dan digunakan untuk menangani *Covid-19* yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga anggaran yang dipotong harus disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan oleh bidang industri. Kegiatan pelatihan IKM Kerajinan dan aneka ini terdiri dari pelatihan jahit dan pelatihan anyaman. Pada tahun 2020 untuk pelatihan jahit tetap diadakan namun jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tersebut dikurangi dari yang sebelumnya, yaitu pada awalnya terdiri dari 20 orang menjadi 10 orang. Sedangkan untuk pelatihan anyaman ditiadakan karena Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram melakukan pemotongan anggaran yang disebabkan karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan *Covid-19*.

Berdasarkan ringkasan anggaran tahun 2020 yang telah di olah, diperoleh informasi rencana anggaran kegiatan pelatihan sebelum adanya perubahan anggaran dan sesudah adanya perubahan anggaran akibat adanya *refocusing* anggaran. Dapat dilihat bahwa bukan hanya dari jumlah peserta pelatihan saja yang dipotong, tapi alat tulis peserta pelatihan jahit; jumlah instruktur pelatihan jahit; sewa tempat pelatihan jahit; sewa peralatan pelatihan jahit; serta makanan dan minuman juga dipotong untuk anggarannya. Anggaran tahun 2020 sebelum adanya perubahan anggaran sebesar 30.825.000, namun setelah adanya perubahan anggaran menjadi sebesar 17.575.000. Jadi besar anggaran yang di potong oleh bidang perindustrian sebesar 13.250.000, yang dimana besar anggaran yang dipotong ini disalurkan ke satuan tugas (SATGAS) *Covid-19* Kota Mataram dan digunakan untuk menangani *Covid-19*.

### **Refocusing Anggaran Kegiatan Pelatihan IKM Kerajinan dan Aneka Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram Tahun 2021**

Pemerintah Kota Mataram melakukan pemotongan anggaran tidak berupa persenan lagi, namun Pemerintah Kota sudah mempatokan berapa anggaran yang harus dipotong oleh instansi-instansi yang ada di Kota Mataram. Sehingga Pemerintah Kota Mataram mengeluarkan kebijakan bahwa dana yang harus dikeluarkan oleh setiap instansi di Kota Mataram harus sesuai dengan porsi-porsi yang sudah diatur oleh Pemerintah Kota Mataram untuk melakukan penanganan *Covid-19*. Sisa anggaran yang dipotong harus disesuaikan dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh setiap instansi. Salah satu instansi yang melakukan pemotongan anggaran sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Mataram adalah Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram.

Pada tahun 2021 pemotongan anggaran hanya dilakukan pada satu bidang saja yaitu bidang perindustrian. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram memilih untuk melakukan pemotongan anggaran hanya pada bidang industri sesuai dengan hasil keputusan bersama. Bidang perindustrian melakukan pemotongan anggaran belanja pengadaan barang senilai 350.000.000. Pemotongan anggaran belanja pengadaan barang dilakukan karena bidang industri sudah tidak melakukan kegiatan pelatihan lagi khususnya untuk IKM kerajinan dan aneka.

### **Penanganan Covid-19**

Sejak *Covid-19* masuk ke Indonesia yaitu tahun 2020 pemerintah Indonesia memfokuskan untuk melakukan penanganan *Covid-19*. Pemerintah Indonesia memikirkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan *Covid-19*. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu melakukan *refocusing* anggaran serta realokasi anggaran. Sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Presiden yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Peraturan tersebut diberlakukan bagi seluruh Indonesia salah satunya yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat juga melakukan *refocusing* anggaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden.

Oleh sebab itu, Pemerintah kota Mataram langsung mengeluarkan surat untuk melakukan *refocusing* anggaran. Walikota Mataram mengeluarkan surat melalui Setda kota Mataram kemudian disebarkan oleh BKD Kota Mataram ke instansi-instansi kota Mataram. Dimana, Pemerintah Kota Mataram

meminta setiap instansi-instansi yang ada di kota Mataram untuk memotong anggarannya sebesar 50% sebagai bentuk penanganan *Covid-19*. anggaran yang sudah dipotong dikumpulkan dan disalurkan oleh Satgas *Covid-19* untuk melakukan penanganan *Covid-19*. Penanganan *Covid-19* ini sudah diatur oleh Pemerintah kota Mataram sesuai dengan *press release* yang dikeluarkan oleh Walikota Mataram Tentang Penanganan *Covid-19* Kota Mataram.

Adapun bentuk penanganan *Covid-19* yaitu memberi pengobatan dan isolasi bagi pasien yang terpapar *Covid-19*. Selain itu ada pula program yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Mataram yaitu program JPS (Jaringan Pengaman Sosial). Program ini memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak *Covid-19* bantuan yang diberikan JPS Kota Mataram sebesar Rp250.000 yang diberikan dalam bentuk paket sembako yang terdiri dari: 10 kg beras, 10 butir telur, 1 liter minyak goreng, 1 kg produk olahan ikan, 4 bungkus biskuit, 1 kg gula pasir, dan sabun.

### **Teori *Stewardship* dalam *Refocusing Anggaran***

Maka dapat diketahui bahwa *Stewardship theory* tidak terlepas dari lebih mementingkan kepentingan *principal* daripada kepentingan pribadi. Teori ini menjelaskan bahwa manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Pemerintah daerah dijelaskan dalam teori ini bahwa pemerintah selaku (*steward*) pelaksana pemerintah akan bekerja dan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama yaitu untuk kepentingan rakyat. *Stewardship theory* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha secara maksimal dalam menjalankan pemerintahannya untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, apabila tujuan ini mampu dicapai oleh pemerintah, maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Adapun implikasi *stewardship theory* pada penelitian ini yaitu untuk menggambarkan dan mendeksripsikan peran pemerintah Kota Mataram yang mampu memberikan komitmen dengan cara melakukan *refocusing*. Adanya *Covid-19* mempengaruhi semua anggaran yang ada di pemerintah, sehingga pemerintah melakukan kebijakan yaitu dengan melakukan *refocusing* anggaran. Oleh karena itu pemerintah kota Mataram melakukan perannya sebagai pengelola dengan ikut melakukan *refocusing* anggaran.

Dampak dari pemerintah Kota Mataram melakukan *refocusing* anggaran bagi masyarakat adalah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya, mampu menampung aspirasi dari masyarakat, dapat dipercaya, dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepadanya serta mampu mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakan yang diambil.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menganalisis dampak *Covid-19* pada anggaran kegiatan pelatihan IKM Kerajinan dan Aneka di Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah dengan adanya pandemi *Covid-19*, membuat Pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan *Covid-19* agar perekonomian tetap berjalan. Berkaitan dengan hal tersebut, presiden mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dengan dikeluarkannya peraturan bahwa adanya *refocusing* anggaran, maka pemerintah Kota Mataram juga ikut melakukan *refocusing* anggaran untuk melakukan penanganan *Covid-19*. Salah satu instansi yang melakukan *refocusing* anggaran adalah Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram melakukan *refocusing* pada seluruh bidang. Bidang perindustrian adalah salah satunya, bidang tersebut melakukan *refocusing* anggaran kegiatan pelatihan IKM kerajinan dan aneka besar anggaran yang dipotong adalah sebesar 50% dari anggaran yang

sudah direncanakan. Sesudah melakukan pemotongan anggaran, maka anggaran tersebut dikumpulkan dan disalurkan ke SATGAS Covid-19. Dimana, SATGAS Covid-19 menyalurkan anggaran tersebut sesuai dengan pos-pos yang sudah ditetapkan untuk melakukan penanganan Covid-19. Bentuk penanganan Covid-19 itu sendiri sudah dikeluarkan *press release* oleh Walikota Mataram. Adapun, bentuk penanganan Covid-19 yang telah dikeluarkan oleh Walikota Mataram adalah memberikan pengobatan dan isolasi bagi pasien Covid-19. Selain itu ada pula program JPS (Jaminan Pengaman Sosial), program ini memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terpapar Covid-19.

Hasil Penelitian ini dapat memberikan beberapa implikasi teoritis, praktis, dan kebijakan. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan implikasi yang luas mengenai *stewardship theory*. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi sebagai bahan masukan atau saran bagi pihak Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram terhadap anggaran pelatihan IKM Kerajinan dan aneka dimasa pandemi Covid-19. Secara kebijakan, penelitian ini dapat memberikan implikasi sebagai bahan masukan ataupun pertimbangan bagi pemerintah daerah terkait kebijakan-kebijakan daerah khususnya *refocusing* dalam mengatasi dampak negatif yang muncul akibat Covid-19.

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya agar lebih baik. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, hanya melihat dari aspek *refocusing* anggaran pada bidang perindustrian dan adanya keterbatasan jangkauan peneliti untuk mengumpulkan dokumentasi dalam validasi data-data keuangan yang didapatkan, karena kondisi pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai dengan level 3 di lingkup Kota Mataram.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dachi, A. P. S. (2021). ANALISIS MENGENAI REFOCUSING ANGGARAN BELANJA LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) DI KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA In *Social Sciences*. IPDN Jatinangor.
- Grediani, E. (2020). Mengungkap fenomena anggaran perubahan dan partisipasi masyarakat akibat Pandemi Covid 19. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 5(2), 69–78. <https://doi.org/10.34202/imanensi.5.2.2020.69-78>
- Ikhsan, A., & Suprasto, H. B. (2008). *Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma* (Pertama). Graha Ilmu. [http://perpus.stiehidayatullah.ac.id/file\\_ebook/Teori%20Akuntansi%20&%20Rset%20Multiparadigma.pdf](http://perpus.stiehidayatullah.ac.id/file_ebook/Teori%20Akuntansi%20&%20Rset%20Multiparadigma.pdf)
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020. (2020). Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). In *Jakarta*.
- Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., kunci, K., & Daerah, B. (2020). *Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Refocusing Policy on Regional Budgets in Handling the COVID-19 Pandemic INFO ARTIKEL ABSTRAK*. 4, 145–156. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2015). *PROGRAM KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2015*.
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 67–89.

- Sanjaya, N. (2020). KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH DIMASA PANDEMI COVID-19 (STUDY KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(2), 273–290. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.608>
- Silaban, V. A. T. (2021). EFEKTIVITAS PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PADA APBD TAHUN 2020 SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA In *Social Sciences*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (Ayup, Ed.; 1st ed., Issue April). Literasi Media.
- Sopannah, & Fauzi Fikri Haikal, M. (2021). REFOCUSING ANGGARAN DI MASA PANDEMI COVID-19. *Conference on Economic and Business Innovation*, 1, 774–782. <https://jurnal.widyagama.ac.id/index.php/cebi/article/view/152>
- Walikota Mataram. (2020). *Press Release Penanganan Covid-19 Kota Mataram*.
- Yin, K. R. (2006). *Studi Kasus Desain & Metode* (D. Prabowo, Ed.). PT. RajaGrafindo Persada.

## Lampiran

Tabel 1. Hasil Wawancara dalam Aspek *Refocusing Anggaran*

<i>Refocusing anggaran</i>	Nama	Hasil Wawancara
Dampak adanya perubahan anggaran	Kepala Dinas	Adanya pandemi <i>Covid-19</i> saat ini, membuat pemerintah mengambil kebijakan yaitu seperti yang kita tau yaitu melakukan <i>refocusing</i> anggaran, sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan
	Kepala Bidang Industri	Saya belum terlalu paham mengenai anggaran tahun 2020-2021 yang disebabkan saya kan baru dilantik sebagai kepala bidang Industri pada bulan Oktober 2021. Jadi yang tahu mengenai anggaran tahun 2020-2021 adalah staf industri, saya hanya melanjutkan kegiatan yang sudah direncanakan oleh kepala bidang sebelumnya
	Kepala Seksi	<i>Refocusing</i> anggaran ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menangani <i>Covid-19</i> . Jadi BKD mengeluarkan kebijakan untuk memotong anggaran sebesar 50% yang digunakan untuk melakukan penanganan <i>Covid-19</i>
	Staf Industri	Walikota Mataram mengeluarkan surat melalui Setda Kota Mataram kemudian disebar oleh BKD Kota Mataram ke instansi-instansi kota Mataram agar melakukan <i>refocusing</i> anggaran sebesar 50% untuk menangani <i>Covid-19</i>
	Kepala Dinas	Kita melakukan <i>refocusing</i> anggaran sesuai kebijakan yang diatas kita, bidang yang melakukan <i>refocusing</i> tahun 2021 hanya pada bidang industri saja
Cara menyikapi adanya perubahan anggaran	Kepala Bidang Industri	Untuk tahun 2021 tidak lagi menggunakan persenan namun dalam bentuk angka
	Kepala Seksi	Ada perbedaan pemotongan anggaran untuk tahun 2020 dan 2021 bahwa pada tahun 2020 pemotongan melalui persenan sedangkan pada tahun 2021 dalam bentuk persenan, dan juga untuk tahun 2021 hanya bidang perindustrian saja yang melakukan <i>refocusing</i>
	Staf Industri	Kami bidang Perindustrian menyikapi adanya <i>refocusing</i> anggaran ini harus sesuai dengan kebijakan serta peraturan yang sudah dikeluarkan. Jika diminta untuk memotong anggaran 50% kami akan melakukan pemotongan anggaran dengan cara merevisi anggaran yang sudah dianggarkan sebelumnya. Kami melakukan pemotongan anggaran dengan memotong anggaran kegiatan pelatihan IKM kerajinan dan aneka. Di sini kami mengurangi jumlah peserta pelatihan IKM kerajinan dan aneka. Dimana, Sebelumnya kami anggarkan untuk tahun 2020 jumlah peserta pelatihan sebanyak 20 orang setelah adanya <i>refocusing</i> anggaran kami mengurangi sebesar 50%, jadi yang kita anggarkan hanya untuk 10 orang peserta pelatihan IKM kerajinan dan aneka di tahun 2020
Periode terjadinya perubahan anggaran	Kepala Dinas	Untuk perubahan anggaran kami melakukannya pada tahun 2020
	Kepala Bidang Industri	Perubahan anggaran dilakukan pada tahun 2020
	Kepala Seksi	Untuk perubahan anggaran dilakukan sejak tahun 2020 sejak <i>Covid-19</i> telah menyebar di Indonesia

<i>Refocusing anggaran</i>	Nama	Hasil Wawancara
	Staf Industri	Periode terjadinya perubahan anggaran pada tahun 2020
	Kepala Dinas	Jika anggaran yang lain kami potong seperti pameran, anggaran untuk pameran tidak mungkin kami potong karena di anggaran tersebut terdapat tiket pesawat, hotel dan lain sebagainya sehingga anggaran yang bisa kami potong ya hanya anggaran pelatihan saja dengan melakukan pengurangan terhadap jumlah peserta yang mengikuti pelatihan IKM
Alasan kegiatan pelatihan IKM kerajinan dan aneka <i>direfocusing</i>	Kepala Bidang Industri	Tidak ada yang bisa kami potong lagi kecuali kegiatan pelatihan
	Kepala Seksi	Hanya anggaran pelatihan saja yang memungkinkan untuk kami potong
	Staf Industri	Hanya anggaran pelatihan yang bisa kami potong

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Tabel 2. Hasil Wawancara dalam Aspek Penanganan Covid-19

No	Penanganan Covid-19	Nama	Hasil Wawancara
1.	Bentuk penanganan Covid-19	Kepala Dinas	Kami melakukan <i>refocusing</i> anggaran sesuai dengan kebijakan. Dimana kebijakan tersebut diatur untuk melakukan penanganan Covid-19
		Kepala Bidang Industri	Bahwasannya, dengan adanya pandemi Covid-19 ini presiden langsung mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 Tentang <i>Refocusing</i> kegiatan, Realokasi anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Dimana, peraturan ini dikeluarkan untuk menangani Covid-19 yang terjadi di tengah masyarakat
		Kepala Seksi	Mengikuti instruksi dari atasan untuk melakukan <i>refocusing</i> anggaran kemudian kami salurkan ke Satgas Covid-19
		Staf Industri	Kami melaksanakan <i>refocusing</i> anggaran yang kemudian anggaran yang sudah kami potong tersebut kita salurkan ke Satgas Covid-19, yang nantinya Satgas Covid-19 yang akan memposkan dana tersebut. Misalnya, Puskesmas dialihkan ke Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dialihkan ke Rumah Sakit, untuk semprot semprot disinfektan dan lain sebagainya dialihkan ke BPBD sudah ada pos-pos nya sendiri. Kami tidak tahu jumlahnya berapa yang tahu masalah tersebut adalah Pak Sekda, tugas kita mengumpulkan anggaran di dinas ini Dan nanti anggaran yang sudah kami kumpulkan akan diposkan oleh Satgas Covid-19 dan kemana saja anggaran tersebut akan dialihkan
3.	Bentuk pembiayaan dan penyaluran dana untuk penanganan pandemi Covid-19	Kepala Dinas	Untuk itu bukan ranah kami, Satgas Covid-19 yang melakukannya
		Kepala Bidang Industri	Kami salurkan ke Satgas Covid-19
		Kepala Seksi	Kami tidak tahu bentuk untuk penanganan Covid-19 karena yang melakukan hal tersebut bukan Dinas melainkan Satgas Covid-19
		Staf Industri	Bentuk penyalurannya, dari anggaran yang sudah dipotong kami salurkan ke Satgas Covid-19. Satgas Covid-19 yang akan memposkan dana tersebut.

No	Penanganan Covid-19	Nama	Hasil Wawancara
		Kepala Dinas	Kami mengikuti sesuai kebijakan pemerintah
4.	Alasan adanya <i>refocusing</i> anggaran untuk penanganan Covid-19	Kepala Bidang Industri	Untuk diberikan kepada pihak yang memerlukan terutama yang terkena Covid-19 seperti biaya pengobatan
		Kepala Seksi	Mengikuti kebijakan dan aturan untuk menangani Covid-19
		Staf Industri	Untuk biaya isolasi dan pengobatan yang terdampak Covid-19, memberikan paket sembako kepada yang membutuhkan serta yang terdampak Covid-19

Sumber: Diolah Peneliti, 2021